**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Dewi Ayu Hidayati, S.Sos.,M.Si**

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Lampung**

**mohmuh\_ling@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemekaran kabupaten Lampung Barat dilihat dari persepsi masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan dampak positif dan negatif dari pemekaran kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah kabupaten Lampung Barat mendapatkan persetujuan dari sebagai besar masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh di kalangan masyarakat bawah, mengingat masyarakat masih banyak yang kurang begitu paham dengan pemekaran daerah. Dampak positifnya adalah sebagian besar dinas merasa lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya karena permasalahan yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas dari masalah Pesisir Barat kini sudah berkurang. Dampak negatifnya berupa terjadinya penurunan PAD, bertambahnya pengangguran, kebudayaan yang hilang, bahkan pariwisata yang tidak lagi menjadi milik Lampung Barat. Pemekaran daerah ini masih dipahami secara sederhana dan terdengar masih awam di telinga masyarakat kota Liwa sendiri. Sikap masyarakat masih menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkan sebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini.

Kata kunci: evaluasi kebjakan, pemekaran, kabupaten Lampung Barat

**EVALUATION OF EXPANSION POLICY OF**

**WEST LAMPUNG REGENCY**

**Dewi Ayu Hidayati, S. Sos., M.Si**

**Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences**

**University of Lampung**

[**mohmuh\_ling@yahoo.co.id**](mailto:mohmuh_ling@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

This study aims to determine how the evaluation of West Lampung regency’s expansion is viewed from the public perception, the knowledge of society, and the positive and negative effects of the expansion policy. This is a kind of descriptive-qualitative research. The data collection was done by in-depth interviews, observation and documentation. Then the collected data were analyzed through three stages, i.e. data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The result of the research shows that the expansion of the West Lampung is highly approved by majority. This is because the expansion is not very influential for the society, since they are much less familiar with the regional expansion. The positive effect is that largely government agencies feel easier to carry out their duties and functions as issues that should be addressed in the Pesisir Barat have now been reduced. Whereas, its negative effects are the decline in revenue, the rise of unemployment, the lost of culture, and even tourisms which no longer belong to the West Lampung. The concept of the expansion is still understood so simply and Liwa’s society still feel unfamiliar with this project. People are still waiting for what the government will do, even some people are skeptical about this project.

.

Keywords: evaluation of policy, expansion, West Lampung regency

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Lampung Barat salah satu kabupaten yang menerapkan otonomi daerah, dimana Kabupaten Pesisir Barat memisahkan diri dari kabupaten Lampung Barat, sehingga kabupaten Lampung Barat yang awalnya kabupaten ini terdiri dari 25 kecamatan dan sekarang setelah pesisir barat memisahkan diri menjadi kabupaten baru, Lampung Barat hanya menjadi 15 kecamatan saja, yaitu sebagai berikut Kecamatan Air Hitam, Balik bukit, Bandar Negri Suoh, Batu Brak, Belalau, Gedung Surian, Kebun Tebu, Lumbok seminung, Pagar dewa, Sekincau, Sukau, Sumber Jaya, Suoh, Way Tenong batu ketulis dan 131 desa atau pekon dengan jumlah penduduk 419.037 jiwa, dan luas wilayah yang tadinya 4.951.28 km² sekarang menjadi 2064.4. km².

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa, Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991. Kabupaten ini domain dengan pegunungan, perbukitan dan berudara sejuk. Pemilihan Liwa sebagai ibu kita Kabupaten Lampung Barat memang tepat, karena letaknya strategis berada ditengah wilayah Lampung Barat selain itu Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri. Penduduk asli Liwa sendiri kabanyak bersuku lampung namun ada juga yang bersuku jawa dan semendo, penghuni masyarakat kota liwa sebagian besar penduduk asli lampung. masyarakat liwa ini masih menjunjung tinggi keragaman adat budayanya, mengadakan festival, beguai jejama, melestarikan kain tapis dan sebagainya. Masyarakat Kota Liwa banyak yang berpenghasilan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang melimpah, tapi yang paling menonjol adalah penghasilan dibidang pertanian seperti sayur mayur, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di povinsi Lampung, jenis sayuran yang dihasilkan diantaranya kentang, cabai, tomat, sawi, buncis, kubis, labu siem, wortel, dalam bidang perkebunan masyarakatnya banyak yang berpenghasilan kopi. Selain pekerjaan masyarakat kota Liwa bertani dan berkebun, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri, namun tidak begitu banyak dibandingkan dengan propesi bertani dan berkebun. Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kota Liwa ini sendiri adalah kecamatan dari Balik Bukit yang terdiri dari 10 desa.

Mengenai Pemekaran Daerah ini tentu mendapat berbagai tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Liwa, Kabupatn Lampung Barat. Pro dan kontra muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah wacana untuk menyikapi fenomena yang dapat dikatakan masih asing terdengar dikalangan warga masyarakat Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.  Terlepas dari berbagai isu yang beredar dalam masyarakat, tentu Pemekaran Daerah ini tidak lepas dari berbagai faktor yang melatar belakanginya, seperti faktor geografis, jumlah penduduk maupun faktor politis. Membahas persepsi masyarakat diatas sudah dikatakan bahwa didalam suatu pemekaran tersebut pasti ada yang namanya persepsi atau tanggapan, persepsi itu sendiri lahir dari masyarakat sekitar yang memang merasakan apa yang terjadi setelah adanya pemekaran tersebut. Pengertian persepsi sendiri yaitu suatu tanggapan masyarakat atas pikiran seseorang individu dari apa yang terjadi dilingkungan sekelilingnya. Masyarakat tidak langsung setuju dengan adanya pemekaran daerah yang dilakukan. Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang menyebabkan pro dan kontra dalam pemekaran daerah. Akan tetapi di dalam pemekaran daerah kabupaten lampung barat, masyararakat memiliki persepsi tersendiri mengenai pemekaran daerah tersebut, seperti adanya penolakan mengenai pemekaran daerah yang dinilai masyarakat kurang efektif dan dinilai hanya sebagai kepentingan politik, kepentingan penguasa saja, Menguntungkan elit-elit politik yang ingin berkuasa dan mengambil keuntungan dari adanya pemekaran daerah tersebut. Selain itu masyarakat juga enggan untuk ikut berkontribusi didalam pemekaran tersebut dikarenakan persepsi masyarakat terhadap pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Barat ini dinilai kurang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemekaran daerah tersebut, hal tersebut atau lebih tampak mempersempit ruang keterlibatan masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk ikut berkontribusi di dalam pembangunan.

Terkadang persepsi masyarakat tergolong masih tradisional, sehingga masyarakat enggan untuk memberikan persepsi yang positif tentang pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat juga beranggapan bahwa jika adanya suatu pemekaran daerah maka akan dapat menimbulkan masalah pada kekuasaan pejabat di Kabupaten Lampung Barat, dimana masyarakat mengatakan jika adanya pemekaran daerah wilayah kekuasaan kabupaten lampung barat berkurang, jika wilayah kekuasaan berkurang pasti penduduk juga akan berkurang, dengan berkurangnya penduduk berdampak pada penurunan PAD ( Pendapatan Asli Daerah) jika sudah begitu masyarakat yang akan dirugikan karena pemerintah pasti terjebak dalam pemikiran jangka pendek, yaitu hanya mengejar PAD dengan menaikan pajak daerah, dengan adanya penaikan pajak tersebut tentu akan memacu beban rakyat, masyarakat semakin tercekik dengan adanya penaikan pajak, persepsi masyarakat juga berlanjut jika pajak naik pasti bahan-bahan pokok sehari-hari ikut naik atau mahal, bagi masyarakat yang khsususnya kalangan bawah akan kehilangan daya beli untuk membeli kebutuhan pokok tersebut mengingat mahalnya bahan-bahan pokok tersebut, dari kejadian ini masyarakat sudah bisa menilai bahwa perekonomian didaerah tersebut semaki terpuruk. Persepsi masyarakat tentang otonomi daerah, masyarakat menilai hanya sebagai proses peralihan kekuasaan semata, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak menanggapi aspirasi masyarakat itu sendiri.

Selain itu masyarakat juga mengatakan bahwa dampak berikutnya dari pemekaran tersebut adalah penurunan PAD yang mempengaruhi pendanaan-pendanaan, baik pendanaan pembangunan, sarana dan prasarana dan juga termasuk terbatasnya untuk menggaji karyawan, masyarakat juga banyak yang mengatakan bahwa terbatasnya gaji karyawan berdampak pada pembatasan pegawai dan pembatasan lapangan pekerjaan, jika sudah begitu maka dampaknya di masyarakat daerah Kabupaten Lampung Barat banyak yang menjadi pengangguran, pengangguran sendiri adalah salah satu bentuk dari beban pemerintahan itu sendiri.

Masyarakat di daerah tersebut menyampaikan setelah terjadi pemekaran di daerah tersebut, masyarakat yang sebelumnya banyak berpenghasilan dibidang perikanan karena masih terdapat laut yang luas dari Kabupaten Pesisir Barat namun saat ini masyarakat di daerah tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari bidang pertanian. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat setempat. dikarenakan pesisir barat yang memisahkan diri, yang sebelumnya masyarakat di daerah tersebut memiliki penghasilan dari laut namun saat ini masyarakat didaerah tersebut hanya mengandalkan penghasilan dari bidang perikanan darat , seperti mengandalkan tambak dan kolam ikan air tawar yang hasilnya kurang memadai dibandingkan dengan penghasilan dari dilaut.

Hingga saat ini Kabupaten Lampung Barat masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Terlebih pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat pada bulan Mei 2012 mengakibatkan berkurangnya luas wilayah menjadi 2.064,40 km2 dan jumlah penduduk 277.296 jiwa. Dampak dari berkurangnya luas wilayah dan penduduk adalah turunnya kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar mengingat Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi perikanan yang cukup besar namun pemanfaatan potensinya masih 30%. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dihasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah evaluasi kebijakan pemekaran daerah kabupaten Lampung Barat?

**METODE PENELITIAN**

jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkap apa adanya yang terjadi dilapangan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil tanpa maksud menguji hipotesa dan peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain dapat menjadi alat pengumpul data utama. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lampung Barat.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bila dilihat dari segi pemahaman masyarakat terhadap pemekaran daerah masih terbilang sederhana dan terdengar masih awam ditelinga masyarakat kota liwa sendiri dan bersifat menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkan sebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini. Hal tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan sosialisasi dari pihak pemerintah yang masih terbilang rendah karena faktor waktu yang terbatas. Pemahaman masyarakat liwa tentang pemekaran diakui masih terbilang kurang, terlihat dari masyarakatnya yang menerima dengan baik pemekaran daerah yang terjadi, mungkin karena mereka kurang paham tentang pemekaran yang terjadi, jika masyarakat pahan tentang pemekaran daerah tentu mereka akan berbicara apakan pemekaran yang terjadi di pesisir itu baik atau tidaknya, mereka pasti akan mengeluarkan suara mereka atau turut berbicara tentang apa yang akan muncul setelah pemekaran itu, apakah pemekaran itu berdampak baik atau tidak. Dari masyarakat kota liwa sendiri yang mereka tau tentang pemekaran daerah hanya sebatas pemecahan kabupaten yang menyebabkan berkurangnya penduduk, khususnya jumlah penduduk masyarakat Liwa.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Suharno selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa persepsinya nya mengenai adanya pemekaran ini setuju-setuju saja karena masyarakat hanya mengikuti jalannya pemerintahan, dan mungkin dikarenakan masyarakat masih kurang mengerti dengan pemekaran daerah tersebut. Jadi apa yang terjadi masyarakat hanya menyaksikan dan menerima apa yang telak dilakukan dari pihak pemerintah sendiri, masyarakat menganggap apa yang dilakukan adalah yang terbaik untuk wilayah mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota liwa setuju akan adanya pemekaran, namun lebih terkesan menerima apa saja yang terjadi dari apa yang terjadi pada jalannya pemerintahan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pemekaran daerah membuat mereka menerima apa saja yang terjadi pada jalannya roda pemerintahan.Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mansyaratkan terlahir dari kehadiran suatu objek untuk dipersepsi orang lain dan diri sendiri, yaitu pemprosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan dan proses kognitif lainnya. Jadi sebelum masyarakat merespon atau menafsirkan kejadian disekelilingnya, masyarakat harus terlebih dahulu memperhatikan kejadian yang ada, dengan melihat kehadiran suatu objek yang menghasilkan sebuah informasi-informasi yang terdapat disekeliling lingkungan masyarakat itu sendiri.

Namun berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah yaitu Pak Yudha Setiawan S.IP selaku Kabag Tata Pemerintahan Umum terjadinya pemekaran daerah pesisir barat karena memang masyarakat pesisir barat sendiri memaksa untuk memisahkan diri dari kabupaten lampung barat menjadi daerah otonom baru, dikarenakan kabupaten pesisir barat sendiri ingin lebih mandiri. Terkait dengan terjadinya Pemekaran pesisir barat berikut alasannya :

a). untuk membangun pesisir barat dengan rentan kendali yang lebih baik

yang artinya pemerintahan di pesisir barat sendiri sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke lampung barat dalam urusan pemerintahannya sendiri, karena mereka sudah memiliki pemerintahannya sendiri, sehingga jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang pemimpin akan lebih mudah tidak terhalang oleh jarak dan waktu yang memang berjauhan. Rentan kendali memang sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan yang ada di pesisir barat, perlunya rentan kendali ini dikarenakan adanya faktor keterbatasan seperti :

* keterbatasan waktu yang artinya pada saat bersamaan seorang pemimpin melakukan pekerjaan beraneka macam
* keterbatasan pengetahuan artinya seorang pemimpin tidak mungkin dapat mengetahui semua pekerjaan yang dilakukan pihak-pihak pemerintah secara sendiri, diperlukan pembagian pekerjaan kepada bawahan
* keterbatasan kemampuan yang artinya bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin terbatas
* keterbatasan perhatian yang artinya karena seorang pemimpin terbatas perhatiannya untuk memperhatikan semua masalah-maslah yang terjadi

b). untuk memudahkan pelayanan masyarakat sekitar

masyarakat sendiri sudah tidak perlu jauh-jauh pergi kelampung barat hanya untuk mengurusi seperti contoh pembuatan KTP, dengan terbentuknya kabupaten pesisir barat sendiri masyarakat pesisir barat tidak perlu jauh-jauh lagi ke lampung barat hanya untuk pembuatan KTP, masyarakat cukup membuat KTP di pesisir barat, jadi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan pembuatan KTP yang tersedia di pesisir barat.

c). Meningkatkan pemerataan pembanguan

Daerah pesisir barat lebih mengetahui yang dibutuhkan oleh daerahnya sendiri untuk meningkatkan pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemekaran daerah dikarenakan Kabupaten Pesisir barat ingin memiliki rentan kendali yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kota dan memiliki pelayanan yang lebih baik pada umumnya.

Selain itu menurut hasil wawancara dari bapak Ruvsel Goltom dari badan pemberdayaan masyarakat daerah mengatakan dari pemerintah sendiri berupaya memberikan arahah atau masukan kepada masyarakat dengan terjadinya pemekaran ini kami dari dinas PMD sendiri akan berupaya lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputu :

1. Aspek ekonomi

Aspek ini yang berhubungan dengan aspek kehidupan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi dan kasumsi barang-barang jasa. Dari segi ekonomonya diharapkan atau diupayakan masyarakatnya Kota Liwa mampu memenuhi aspek ekonominya dengan baik, yang tadinya perekonomian yang masih terbilang buruk semoga akan membaik, jadi dari pemerintah akan memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat tentang bagaimana membuat perekonomian masyarakat semakin membaik, seperti memberikan sosialisasi berwirausaha yang baik, bertani yang baik, sehingga masyarakatnya tidak buta akan ilmu tentang cara membangun perekonomian yang lebih baik.

1. Sosial budaya

Sosial yang artinya pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat mengandung nilai-nilai kebersamaan, kerjasama dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Budaya yang artinya nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Sosial budaya masyarakat kota liwa sudah cukup baik, dilihat dari kebersamaan dari masyarakat yang masih pula menjungjung tinggi adat istiadat mereka dengan baik, masih menjalankan tradisi kebudayaan mereka dengan baik. Setiap diselenggarakannya kegiatan kebudayaan, seperti festiavas masyarakatnya masih berduyung-duyun menyambut dan melihat acara tahunan itu, terlihat bahwa masyarakatnya masih menghargai kebudayaan yang mereka punya, masih memberikan partisipis, empati merekan kepada kebudayaan yang ada dilingkungan mereka sendiri, solidaritas yang tinggi akan kebudayaan mereka.

1. Lingkungan hidup

Tentang bagaimana masyarakat bisa dapat berfungsi dan bagaimana mereka dapat berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan merekan. Lingkungan hidup adalah bagian komponen dari hidup mereka sendiri. Linggkungan hidup dari kota liwa dilihat dari alam sekitar masih terlihat jelas keasrian dari alam yang sejuk dan pepohonan yang masih cukup banyak tidak dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi seperti dikota, tapi keadaan ini terlihat bahwa dikota liwa ini masih terbilang sepi, dan jauh dari kata makmur dan ramai seperti dikota, mungkin dikarenakan masyarakatnya sendiri bukan dari kalangan pengusaha keatas melainkan masyarakat biasa yang hanya bisa menghasilkan uang dari kebun mereka, jadi mereka tidak mampu membuat usaha yang terbilang cukup besar seperti halnya moll dan sebagainya.Dari aspek kehidupan diatas, diharapkan masyarakat secara bertahap masyarakat kota liwa mampu membangun diri dan lingkungan serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

Berbicara tentang peranan dari pemerintahan dalam pemekaran kabupaten pesisir barat disini Tata Pemerintan Umum lah yang paling berperan. Menurut pak Yudha Setiawan S.IP selaku Kabak di dinas Tata Pemerintahan Umum mengatakan, terbentuknya Daerah Otonom Baru Pesisir Barat tidak lepas dari peran Tata Pemerintahan Umum sendiri, mulai dari Proses awal rujukan masyaraka yang memang bertekat untuk membentuk derah otonomi baru sampai dengan lahirnya otonomi baru kabupaten pesisir barat yang sekarang sudah menjadi kabupaten sendiri, yang mengurusi persetujuan dprd, mengurusi dan menlengkapi berkas berkas yang dibutuhkan dalam pembentukan Derah Otonom Baru (DOB), melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan daerah otonom baru, sampai lahirnya daerah otonomi baru yang berdiri sendiri yaitu kabupaten pesisir barat yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012.. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa peranan dari Tata Pemerintahan Umum ini sangan besar dalam terjadinya pementukan Daerah Otonomi Baru, tanpa andil dan persetujuan dari Tata Pememrintahan Umum kabuapten pesisir pesisir barat tidak akan terbentuk, jadi dari pihat pemerintah Tata Pemerintahan umum sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana mestinya.Pemekaran Daerah adalah pemisahan wilayah dari kabupaten induknya yang membentuk kabupaten baru, dari pemekaran ini ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan, dilihat dari babupaten induknya terlihat bahwa pasti ada dampak yang ditimbulkan dari pemekaran daerah yang terjadi, baik itu dampak yang positif sampai dengan dampak yang negatif, pasti terjadinya perubahan-perubahan yang dirasakan masyarakat kota liwa baik dari pihat pemerintahannya ataupun masyarakat biasa.

Pemekaran Daerah adalah pemisahan wilayah dari kabupaten induknya yang membentuk kabupaten baru, dari pemekaran ini ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan, dilihat dari babupaten induknya terlihat bahwa pasti ada dampak yang ditimbulkan dari pemekaran daerah yang terjadi, baik itu dampak yang positif sampai dengan dampak yang negatif, pasti terjadinya perubahan-perubahan yang dirasakan masyarakat kota liwa baik dari pihat pemerintahannya ataupun masyarakat biasa.Menurut Rusvel Golto dari badan pemberdayaan masyarakat daerah mengatakan dengan adanya pemekaran kabupaten pesisir barat ini menimbulkan suatu dampak,dilihat dari dampak negatifnya, dampak yang terjadi terlihat bahwa terjadinya penurunan PAD, dilihat dari jumlah wilayah yang berkuran dan penduduk yang berkurang, pasti akan mempengaruhi berkurangnya PAD yang akan berdampak pada pendanaan-pendanaan seperti terbatasnya untuk pendanaan pembangunan termasuk terbatasnya pendanaan untuk menggaji karyawan, bila gaji saja sudah terbatas pasti akan berdampak pada pembatasan lapangan pekerjaan atau ketenaga kerjaan, kalau sudah begitu masyarakat banyak yang menjadi pengangguran karena sulitnya lapangan kerja yang tersedia, dikarenakan pembatasan lapangan yang tersedia. Pengangguran sendiri sudah menjadi beban dari pemerinta, seperti halnya dinas sosial yang menangani masalah pengangguran, akan menjadi beban pikiran dan membuat upaya mereka menjadi lebih besar untuk mengurangi angka pengangguran yang terjadi. Dari hasil wawancara siatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi dari pemekaran daerah terjadinya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang banyak berpengaru pembiyayaan seperti pada agaran penggajian, terbatasnya ketenaga kerjaan yang tersedia, dan juga terjadinya pengangguran yang menjadi beban pemerintah dan masyarakat kalangan bawah.

Hasil wawancara dari bapak Sidik tokoh adat desa Sukarame mengatakan bahwa terjadinya pemekaran pesisir barat ini sedikit kurang setuju karena kalau dilihat dari segi adat atau kebudayaannya, saya disini selaku tokoh adat saya melihat terjadinya kehilangan kebudayaan seperti festifal teluk stabas yang tadinya dimiliki lampung barat sekarang sudah tidak lagi karena mengingat pesisir barat yang memang sudah menjadi kabupaten baru dan festifal Teluk Stabas sudah disahkan menjadi kebudayaan milik Kabupaten Pesisir Barat, jadi sanagt berdampak bagi masyarakat kota liwa sendiri yang tidak bisa lagi menikmati atau merayakan festifal teluk stabas yang semestinya. Saya sendiri sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut.Dapat disimpulkan bahwa dari pemekaran daerah yang terjadi dari segi kebudayaannya terjadinya pengurangan kebudayaan, seperti kebudayaan pada festifal teluk stabas yang sudah menjadi hak milik Kabupaten Pesisir Barat padahal sebelumnya festifal ini adalah salah satu kebanggaan kegiatan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Liwa . Kebudayaan adalah salah satu kebiasaan acara yang dilakukan oleh para leluhur yang harus dibudidayakan dan harus dikembangkan, supaya terjadinya suatu kebersamaan, solidaritas yang tinggi, dan juga partisipasi dari masyarakat sendiri, melalului kebudayaan-kebudayaan yang ada. Kebudayaan lampung barat memiliki corak tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain.

Selain itu dampak yang timbul dirasakan pula oleh dinas sosial, bapak Robinso S.Sos sebagai sekretaris dinas sosial menyampaikan dampak positif dan negatifnya dari pemekaran pesisir barat tersebut, pak robin mengatakan untuk dampak positipnya dari dinas sosial sendiri mengalami pengurangan untuk menangani maslah-masalah yang diurus oleh Dinas Sosial seperti berkurangnya masalah gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, fakir miskin, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan sebagainya, dari berkurangnya penduduk maka masalah-masalah tadi akan sangat berkurang. Untuk dampak negatifnya terjadi bertambahnya atau meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Lampung Barat karena wilyah kerja dan tenaga kerja sudah ada atau sudah banyak di wilayah Pesisir Barat yang mengakibatkan jumblah tenaga kerja menurun di Lampung barat, selain itu juga lapangan dan ketenaga kerjaan di lampung barat juga sudah terbatas.

Strategi utama mengatasi pengangguran adalah menciptakan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya. Namun untuk menciptakan laangan pekerjaan yang banyak ada berbagai kendala yang sangat komleks, faktor-faktor yang mempengaruli masalah penciptaan kesempatan kerja diataranya adalah masih sulitnya arus masuk investor dari luar ke Kabupaten Lampung Barat. Mengatasi masalah pengangguran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyaraka. Terutama adalah instansi pembina sektor yang mempunyai peran besar dalam menciptakan kesempatan kerja. Demikian pula pemerintah daerah khususnya. maka setiap kebijakan dan program diarahkan agar berdampak-dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerinta untuk mengatasi masalah pengangguran, diantaranya :

1. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat
3. Menyusun program kegiatan yang memprioritaskan bidang ketenagakerjaan
4. Pembinaan dengan membukakan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja guna menjadi bekal pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemekaran daerah yang terjadi untuk Dinas Sosial mengalami dampak yang positif dan juga negatif. Untuk dampak yang pisitip yang terjadi yaitu pengurangan penangan masalah-masalah seperti penanganan pengemis, gelandangan, pemulung yang talah diungkapkan diatas, untuk dampak negatif terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya angkatan kerja tanpa diikuti perluasan dan penciptaan lapangan kerja pada bebagai sektor ekonomi akan mengakibatkan jumlah pengangguran yang juga meningkat. Peningkatan pencari kerja (pengangguran) merupakan masalah besar dalam bidang ketenaga kerjaan Lampung Barat.Menurut salah satu pegawai pariwisata dan sebagai tokoh masyarat Afriyan mengatakan semenjak terjadinya pemekaran daerah pesisir barat, terjadinya pengurangan sumber daya alam yang berupa pariwisata, dulu lampung barat yang punya hak milik semua pariwisata yang ada dipesisi barat sekarang berpindah hak kepemilikan, lampung barat hanya memiliki pariwisata danau ranau, gunung seminug. Dapat dihitung jari bila dibandingkan sewaktu pesisir barat belum memisahkan diri. Pesisir barat kaya akan pariwisata lautnya yang memang sudah terkenal dimanca negara, orang-orang diluar sana sudah banya yang mengetahui tentang hal itu, banyak yang berkunjung kesana tanpa terkucuali turi-turis yang singgah, semakin sering pendatang baru datang maka semakin terkenal pula daerah wilayah tersebut, jika sudah begitu wilayah itu akan menjadi ramai dan pasti banyak investor luar yang masuk untuk membuka usaha disana sehingga wilayahnya semakin maju, tapi sayang pesisir barat kini bukanlah menjadi milik lampung barat lagi, kekayaan alam dan hasil retribusi dari hasil pariwisata sudah tidak bisa masuk kelampung barat lagi, jika sudah begitu berpengaruh pada pengurangan PAD jadi dari pemekaran daerah pesisir barat ini ada yang dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemekaran daerah Kabupaten Pesisir Barat terjadinya pengurangan sumber daya alam (pariwisata) dan juga hasil retribusi pariwisata yang berkurang.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemekaran daerah kabupaten Lampung barat dilihat dari segi persepsi sebagian besar masyarakatnya setuju akan adanya pemekaran tersebut, hal ini dikarenakan pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh diakalangan masyarakat bawah, mengingat masyarakat masih banyak yang kurang begitu paham dengan pemekaran daerah.
2. Dalam pemekaran ini terdapat pula dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif dan negatifnya, untuk positifnya sebagian besar dinas merasa lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya karena permasalah yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas dari maslah pesisir barat kini sudah berkurang. Untuk negatifnya terlihat bahwa terjadinya penurunan PAD, bertambahnya pengangguran, kebudayaan yang hilang, bahkan pariwisata yang tidak lagi menjadi milik lampung barat.
3. Bila dilihat dari segi pemahaman masyarakat terhadap pemekaran daerah masih terbilang sederhana dan terdengar masih awam ditelinga masyarakat kota liwa sendiri dan bersifat menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkan sebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini.

**SARAN**

Setelah melalui penelitian mendalam tentang evaluasi kebijakan pemekaran daerah kabupaten study pada kabupaten lampung barat, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah lebih harus maksimal lagi memberikan arahan atau masukan kepada masyarakat kota Liwa tentang pemahaman pemekaran daerah itu sendiri, sehingga masyarakat lebih faham dan mengerti apa yang sedang terjadi, dari sana masyarakat bisa memberikan aspirasi, opini atau tanggapan yang berkaitan dengan pemekaran ini, apakah pemekaran daerah ini baik atau tidak.
2. Pemerintah harus bisa menyelesaikan atau menstabilkan kembali terhadap dampak-dampak yang timbul di masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
3. Pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan lagi tentang pemahaman pemekaran daerah yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Alfabeta: Bandung.

Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengentar*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.

Marpaung, Lintje, Anna. 2012. *Politik Hukum Tata Negara: Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Pustaka Magister: Semarang.

Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Santoso AZ, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Sugiyono, 2013*. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website

[*www.academia.edu/8822980/persepsi-dan-konsepsi-diri-dalam-komunikasi*](http://www.academia.edu/8822980/persepsi-dan-konsepsi-diri-dalam-komunikasi)

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<http://digilib.unila.ac.id/3623/12/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 10 juni 2016

<http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/1._sobirin.pdf> diakses tanggal 10 juni 2016